

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2020

Larantuka 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami menyadari laporan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami demi terselesainya laporan ini.

Dalam laporan ini banyak kekurangan dan kesalahan yang jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2020

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur



Achmad R. Duh, SE
Penyelia Tingkat 1
NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I. PENDAHULUAN	3
A. Penjelasan Umum Perangkat daerah	3
B. Permasalahan (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	8
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	11
A. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	12
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	27
BAB. IV. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Perangkat daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Asas - Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, atas pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

1. Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

- Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, data dan evaluasi, kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
 3. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
 4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dana bergulir APBD I, dana bergulir APBD II dan dana kementerian koperasi.
 5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru;
 6. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus/ pengawas koperasi dan pelaku usaha mikro;
 7. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula secara terus menerus;
 8. Mengikutsertakan pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru dalam penyelenggaraan pameran produk usaha mikro di pada tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional;
 9. Melakukan sosialisasi perkoperasian;
 10. Melakukan pembinaan, pengawasan dan memilih koperasi berprestasi;
 11. Menghadiri dan mendampingi koperasi dalam persiapan rapat anggota tahunan (RAT) maupun dalam pelaksanaan RAT.
 12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi; dan
 13. Melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki aparatur sipil negara (ASN) 30 orang, yang tersebar pada berbagai pangkat dan golongan, tingkat pendidikan dan tingkat eselon. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel Keadaan pegawai dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan (Dipisah menurut jenis kelamin)

No.	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina (IV/a)	1	2	-	-	-	-	3
4	Penata Tingkat 1 (III/d)	-	2	-	3	-	-	5
5	Penata (III/c)	-	3	1	1	-	-	5
6	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	-	1	2	-	-	-	3
7	Penata Muda (III/a)	-	-	1	1	-	-	2
8	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	-	-	1	4	-	-	5
9	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)	-	-	-	6	-	-	6
10	Juru Tingkat 1 (I/d)	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	9	5	15	-	1	31

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Desember 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai tersebar antara Sekolah Dasar (SD) sampai Strata 2 (S2). Tingkat pendidikan terbanyak pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 15 ASN atau 48,38%, sedangkan tingkat terendah pada tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sejumlah 1 ASN atau 3,22% dan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1 ASN atau 3,33%.

Selain ASN, perangkat daerah juga didukung oleh tenaga pendamping koperasi, baik yang ditempatkan sebagai tenaga operasional di perangkat daerah maupun yang bertugas mendampingi koperasi dan pelaku usaha mikro di lapangan sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) pendamping yang tersebar pada 19 Kecamatan, 2 (dua) tenaga fasilitator, 3 (tiga) tenaga pendamping pasca pelatihan, 4 (empat) tenaga pendamping penyuluh koperasi lapangan.

- Struktur organisasi perangkat daerah (terlampir) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
- 3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 6) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- 7) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- 8) Seksi Kelembagaan dan Perijinan
- 9) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
- 10) Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
- 11) Seksi Fasilitas Usaha Koperasi
- 12) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 13) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi
- 14) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
- 15) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
- 16) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Table struktur organisasi

B. Permasalahan (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Dalam pemberdayaan koperasi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain :

1) Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia yang di maksud adalah semua pengurus koperasi, karena sering kita jumpai pengurus koperasi biasanya tokoh masyarakat yang rangkap jabatan, sehingga tidak fokus pada koperasi. Ada juga pengurus yang sudah berumur, sehingga kapasitasnya terbatas, tidak memahami perkembangan jaman. Sangat diperlukan pengarahan tentang koperasi agar dapat berpartisipasi aktif didalamnya. partisipasi merupakan faktor yang penting didalam mendukung perkembangan koperasi.

2) Keterbatasan modal;

Masalah modal, pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Dengan pemberian modal koperasi dari pemerintah, koperasi dapat memperluas usahanya, sehingga dapat bertahan dan berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, dimana mereka selaku anggota yang mempunyai dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.

3) Disiplin pengurus, pengawas dan pengelola;

Disiplin dan kerja keras pengurus/ pengawas dan pengelola koperasi saat ini masih jauh dari harapan, sehingga koperasi akan sulit untuk berkembang apalagi untuk maju. Untuk itu dalam memilih dan menetapkan pengurus koperasi harus diseleksi dengan baik agar nantinya tidak ada pengurus yang makan gaji buta tanpa mau bekerja.

4) Koperasi saat ini kurang diminati.

Sejauh ini koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat, adalah kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa ada pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Dari sinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Dengan adanya koperasi, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan bertambah. Masyarakat dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak kemakmuran yang merata, sehingga mereka berminat untuk bergabung.

5) Pesaing.

Pesaing merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan lagi tetapi kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan (pesaing), maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya, maka koperasi akan *survive* dan dapat berkembang. Dalam menghadapi pesaing kita harus mempunyai trik-trik khusus, misalnya melalui harga barang dan jasa, sistem kredit dan pelayanan yang maksimum. Mungkin koperasi sulit untuk bermain dalam harga, tapi hal ini dapat kita lakukan dengan cara sistem kredit yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu mingguan ataupun bulanan, tergantung perjanjian. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota.

6) Teknologi.

Koperasi yang sampai sekarang masih belum menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam pembukuan, keuangan, administrasi dan pada bidang-bidang lainnya. Sehingga bagaimana mungkin koperasi itu mau atau akan maju jika sarana prasarana penunjang kegiatan tidak dimiliki? Untuk itu, hendaknya koperasi mulai sekarang harus memperhatikan teknologi untuk produksi maupun informasi kepada anggota. Apabila semua kegiatan koperasi bisa dijalankan dengan baik, dan setiap anggota mau mengambil bagian dalam kegiatan koperasi, serta perhatian pemerintah bisa memberikan motivasi yang baik, koperasi pasti berjalan dengan lancar.

7) Tingkat partisipasi anggota yang masih rendah.

Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal, masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu bahwa koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi, konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentunya sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota, tidak ada kontrol dari anggotanya sendiri terhadap pengurus.

- 8) Harga barang dikoperasi lebih mahal dibanding harga pasar.

Masyarakat menjadi enggan untuk membeli barang dikoperasi karena harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat, konsumen akan memilih untuk membeli suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi, sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi sedikit bahkan merugi, sehingga perkembangan koperasi berjalan lambat bahkan tidak berjalan sama sekali.

- 9) Kurangnya pengawasan pemerintah.

Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi tidak maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana-dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi manja dan tidak mandiri, hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah, bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus menerus menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan yang baik, walaupun dananya dalam bentuk hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana prasarana aparatur	20%
3	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7 dokumen

4	Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha	Jumlah UKM/ LKM	55 UMKM 1 dokumen
5	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan terampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dsan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/ bimtek.	Pengembangan wirasusaha baru/ wirasusaha pemula	205 orang 50 koperasi 300 WP
5	Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar	UMKM dan koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	6 UKM
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi aktif	16 kelompok pra koperasi 10 koperasi 154 koperasi/KUD 75 koperasi

B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Dari perjanjian kinerja tahun 2019 di atas, dapat dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional.
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

- f) Penyediaan alat tulis kantor.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j) Penyediaan makanan dan minuman.
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
- l) Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur dengan kegiatan yaitu :

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor
- b) Pengadaan meubeler
- c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- e) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yaitu : Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan.

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan yaitu :

- a) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan yaitu :

- a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
- c) Pembinaan dan pendampingan wirausaha pemula pasca pelatihan

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan yaitu : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan yaitu :

- a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- c) Rapat anggota tahunan koperasi/ KUD
- d) Pembinaan pengawasan KSP dan KJKS

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja perangkat daerah dan realisasi anggaran tahun 2019.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah.

Pada tahun 2019 perangkat daerah menetapkan enam sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2018-2022, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;
5. Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar; dan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 terbagi atas 2 (dua) belanja yaitu : belanja program perangkat daerah dan belanja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Evaluasi pencapaian kinerja per program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Program Perangkat Daerah

Sasaran umum untuk belanja program perangkat daerah ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana prasarana aparatur dan terwujudnya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan. Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan :

- Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

Dengan target tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan. Input dana Rp. 3.400.000. Capaian realisasi keuangan Rp. 3.399.600., atau 99,98%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Dengan target tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Input dana Rp. 33.351.996., Capaian realisasi keuangan Rp. 32.373.520., atau 97,06%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;

Dengan target tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan sejumlah 10 unit kendaraan. Input dana Rp. 2.400.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 2.393.000., atau 99,70%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Dengan target tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Input dana Rp. 36.055.650., Capaian realisasi keuangan Rp. 36.055.650., atau 100%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Dengan target tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 21 jenis. Input dana Rp. 5.002.765., Capaian realisasi keuangan Rp. 5.002.650., atau 99,99%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.

6. Penyediaan alat tulis kantor;
Dengan target tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 48 jenis ATK. Input dana Rp. 40.925.800., Capaian realisasi keuangan Rp. 40.925.800., atau 100%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Dengan target tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 95.250 lembar. Input dana Rp. 52.888.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 52.888.000., atau 100%. Outcome: prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
Dengan target tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik sebanyak 8 komponen. Input dana Rp. 17.742.504., Capaian realisasi keuangan Rp. 17.741.900., atau 99,99%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Dengan target tersedianya bahan bacaan sebanyak 2 bahan bacaan. Input dana Rp. 3.500.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 2.715.000., atau 77,57%., Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.
10. Penyediaan makanan dan minuman;
Dengan target tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan. Input dana Rp. 11.200.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 11.198.000., atau 99,98%. Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
Dengan target tersedianya terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 17 kali dalam dan luar daerah. Input dana Rp. 248.355.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 248.207.735., atau 99,94%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.
12. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran;
Dengan target tersedianya kebutuhan teknik perkantoran sebanyak 29 orang. Input dana Rp. 414.055.650., Capaian realisasi keuangan Rp. 402.555.650., atau 97,22%. Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 20 persen.

- **Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur** dengan kegiatan :
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor;

Dengan target tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 4 laptop. Input dana Rp. 22.295.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 22.295.000., atau 100%. Outcome : persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 20 persen.
 2. Pengadaan meubeler;

Dengan target tersedianya kebutuhan meubeler sebanyak 2 unit. Input dana Rp. 8.676.300., Capaian realisasi keuangan Rp. 8.633.800., atau 99,51%. Outcome : prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor sebanyak 20 persen.
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;

Dengan target tersedianya pemeliharaan gedung kantor untuk 1 unit. Input dana Rp. 5.613.250., Capaian realisasi keuangan Rp. 5.613.250., atau 100%. Outcome : prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 20 persen.
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

Dengan target tersedianya pemeliharaan kendaraan roda empat untuk 1 unit. Input dana Rp. 21.200.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 21.154.715., atau 99,78%. Outcome : prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 20 persen.
 5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

Dengan target tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor sebanyak 19 unit. Input dana Rp. 3.030.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 3.030.000., atau 100%. Outcome : prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 20 persen.
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan;

Dengan target tersedianya laporan keuangan SKPD sebanyak 7 dokumen. Input dana Rp. 47.456.250., Capaian realisasi keuangan Rp. 47.415.250., atau 99,91%. Outcome : prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan sebanyak 20 persen.

Belanja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- **Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif** dengan kegiatan:

1. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;

Dengan target jumlah UMKM yang dilatih sebanyak 55 UMKM dengan kegiatan magang peternak puyuh bagi wirausaha pemula/ baru di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh 1 orang wirausaha pemula/ baru yang didampingi oleh 1 ASN dan penyerahan barang dalam hal ini sarana dan prasarana perlengkapan kebutuhan PKL di pusat PKL kuliner Kelurahan Weri sebanyak 20 pedagang, dan teralisasinya pembayaran honor fasilitator bagi 10 orang fasilitator selama 12 bulan, dengan Input dana Rp. 248.882.750., Capaian realisasi keuangan Rp. 247.731.950., atau 99,53%. Outcome : peningkatan pendapatan UMKM sebanyak 55 UMKM.

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Dengan target jumlah KUKM sasaran sebanyak 1 dokumen dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana bergulir APBD II kepada 169 pelaku usaha, dan monitoring dan evaluasi bantuan dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kepada 48 Penerima hibah. Untuk satu kegiatan yaitu kerjasama dengan pihak ketiga dengan anggaran Rp. 25.000.000., tidak dapat direalisasikan karena MoU antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak ketiga tidak diperbolehkan oleh aturan. Kerjasama dengan pihak ketiga harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bukan oleh OPD yang bersangkutan langsung. Sehingga kegiatan ini tidak dapat terealisasi dan anggaran yang dipagukan di kembalikan ke kas daerah.dengan Input dana Rp. 76.079.500., Capaian realisasi keuangan Rp. 50.964.500., atau 99,95%. Outcome : pemanfaatan dana dan pelunasan dana sebanyak 50 UMKM.

- **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;

Dengan target jumlah UMKM yang dilatih sebanyak 205 orang dengan dengan 3 kali kegiatan bimtek pengolahan pakan ternak babi, peserta 150 wirausaha pemula/ baru dengan narasumber dari Jakarta dan Kupang. Input dana Rp. 261.194.362., Capaian

realisasi keuangan Rp. 261.189.962., atau 99,99%. Outcome : meningkatnya kualitas wirausahawan yang lebih maju sebanyak 205 orang.

2. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD;

Dengan target jumlah UMKM yang dilatih sebanyak 150 koperasi dengan terlaksananya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD sebanyak 3 kali kegiatan pelatihan yaitu Pelatihan pembukuan bagi usaha mikro orang muda Flores Timur, Pelatihan manajemen usaha bagi koperasi/ KUD dan Pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi/ KUD. Peserta pelatihan sebanyak 150 orang yang terdiri dari wirausaha pemula/ baru, pelaku UMKM dan pengurus koperasi. Kegiatan ini anggarannya bersumber dari DAK Non Fisik dana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UKM (PK2UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2019. Input dana Rp. 450.500.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 450.318.500., atau 99,95%. Outcome : meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan koperasi dibidang akuntansi kepada 150 koperasi.

3. Pembinaan dan pendampingan wirausaha pemula pasca pelatihan;

Dengan target jumlah wirausaha pemula yang didampingi sebanyak 300 WP dengan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula/ baru sejumlah 233 Orang, dan terlaksananya kegiatan temu bisnis pelaku usaha wirasusaha pemula/ baru bersama OPD terkait yang melaksanakan misi Selamatkan Orang Muda Flores Timur sebanyak 3 kali pertemuan yang dihadiri oleh 60 orang.. Input dana Rp. 106.876.500., Capaian realisasi keuangan Rp. 102.296.500., atau 95,71%. Outcome : tersedianya wirausahawan pemula yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengelolaan usaha sebanyak 300 WP.

- **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

dengan kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah; dengan target terlaksananya jumlah koperasi dan UMKM yang dipromosikan produk usahanya sebanyak 6 UKM, dengan kegiatan promosi produk UMKM dan terwujudnya keikutsertaan pelaku UMKM binaan perangkat daerah dalam mengikuti pameran promosi produk UMKM, yang dilaksanakan dalam daerah yaitu pameran / promosi dalam rangka memeriahkan Hari

Ulang Tahun Koperasi Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur ke-72, pameran / promosi Sunda Kecil Expo di Kupang dan pameran / promosi Indonesia Fashion Week di Jakarta. Selain kegiatan pameran / promosi, perangkat daerah juga menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah berlokasi di Kelurahan Sarotari dengan menyediakan 16 jenis kebutuhan pokok dan dijual ke semua masyarakat yang ingin berbelanja. Pelaku UMKM juga dilibatkan dalam kegiatan Festival Bale Nagi yang diselenggarakan di 2 tempat yaitu Pante Oa dan Taman Kota Larantuka, sebanyak 2 pelaku UMKM. Input dana Rp. 165.830.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 163.486.923., atau 98,58%. Outcome : perluasan akses pasar bagi produk UKM sebanyak 6 UKM.

- **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** dengan kegiatan :

1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;

Dengan target jumlah kelompok sasaran sebanyak 16 kelompok pra koperasi dengan kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian pada 9 kelompok pra koperasi dan pendataan kelompok pra koperasi menjadi koperasi berbadan hukum pada 7 kelompok. Input dana Rp. 13.985.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 13.985.000., atau 100%. Outcome : terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian pada 16 kelompok pra koperasi.

2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;

Dengan target jumlah koperasi sasaran sebanyak 10 koperasi dengan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi terhadap 8 koperasi sasaran. Dari 8 koperasi ini langsung dinilai dari aspek organisasi, aspek usaha dan aspek keuangan sehingga terpilih 3 koperasi yang menjadi koperasi berprestasi tingkat kabupaten yaitu :

- Juara I : Koperasi Kredit (Kopdit) Ikamala dengan skor penilaian 83,00
- Juara II : Koperasi Serba Usaha (KSU) Ratu Damai dengan skor penilaian 78,50
- Juara III : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Persatuan Ojek Lintas Solor (POLIS) dengan skor penilaian 72,75

Selain itu, aparaturnya perangkat daerah juga menghadiri HUT ke 72 Koperasi Tingkat Provinsi di Kupang sebanyak 3 orang. Input dana Rp. 39.327.500., Capaian realisasi keuangan Rp. 38.108.569., atau 96,90%. Outcome : terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi kepada 10 koperasi.

3. Rapat anggota tahunan koperasi/ KUD;

Dengan target koperasi aktif yang melaksanakan RAT sebanyak 154 koperasi/ KUD dengan kegiatan pendampingan pra RAT kepada 26 koperasi dan pendampingan RAT kepada 59 koperasi dari 141 koperasi aktif. Input dana Rp. 49.420.000., Capaian realisasi keuangan Rp. 49.325.000., atau 99,80%. Outcome: terlaksananya pendampingan dan evaluasi oleh dinas teknis dalam setiap RAT bagi 154 koperasi/KUD.

4. Pembinaan pengawasan KSP dan KJKS;

Dengan target jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa sebanyak 75 koperasi dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada 9 koperasi, pengusulan sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) pada 23 koperasi, baik yang usul baru maupun perpanjangan masa aktif NIK. Input dana Rp. 57.487.550., Capaian realisasi keuangan Rp. 57.112.550., atau 99,34%. Outcome : terwujudnya laporan yang akuntabil bagi 75 koperasi.

Adapun analisis kinerja untuk melihat pencapaian per sasaran dari 4 sasaran yang ada dalam renstra untuk belanja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

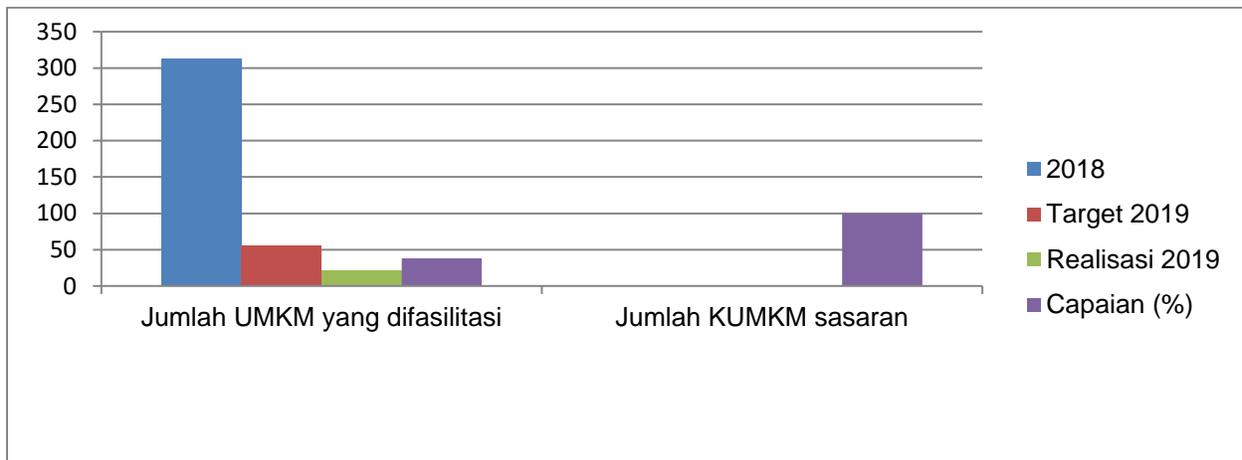
Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;

Sasaran ini dicapai melalui Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif yang didukung dalam kegiatan Fasilitasi pengembangan UKM dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2018	2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah UMKM yang difasilitasi - Jumlah KUMKM sasaran	313 UMKM 1 dok.	55 1 dok.	21 1 dok.	38,18 100

Capaian sasaran 1



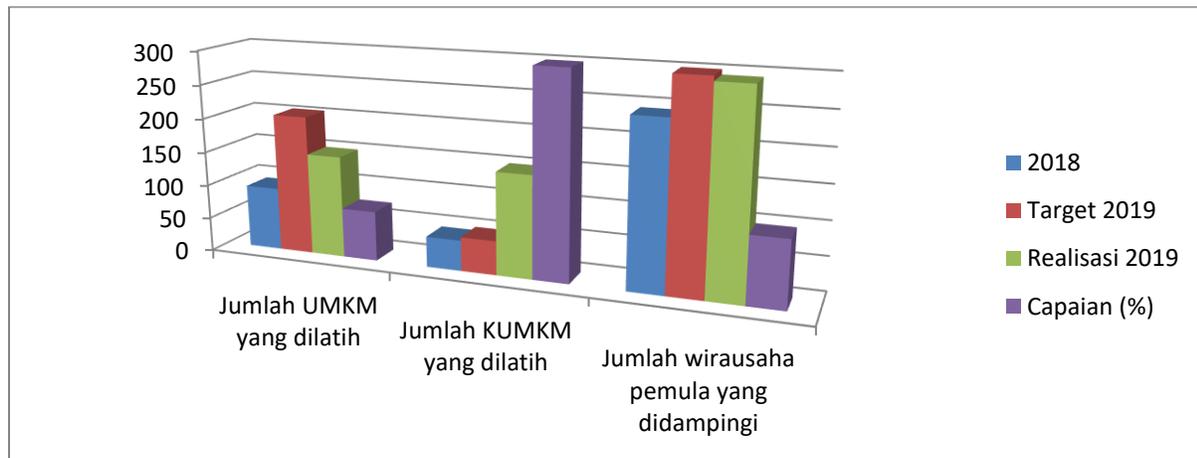
Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing trampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM yang didukung dalam kegiatan Penyelenggaraan kewirausahaan, Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD dan Pembinaan pendampingan wirausaha pemula pasca pelatihan.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	2018	2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah UMKM yang dilatih	93	205	150	73,17
	- Jumlah KUMKM yang dilatih	45	50	150	300
	- Jumlah wirausaha pemula yang didampingi	243	300	293	97,66

Capaian sasaran 2



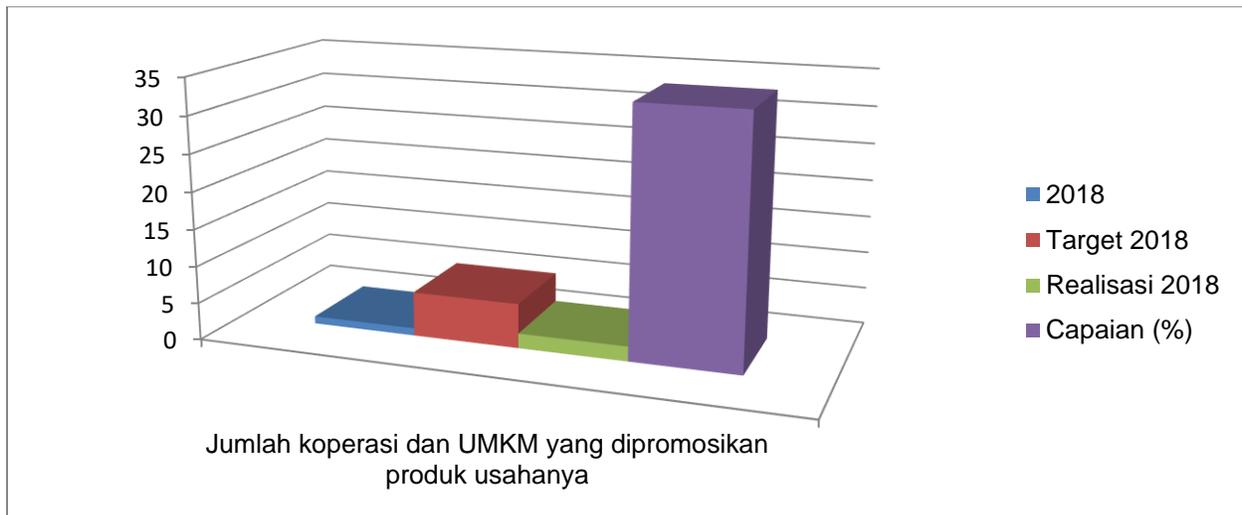
Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang didukung dalam kegiatan Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	2018	2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah koperasi dan UMKM yang dipromosikan produk usahanya.	1	6	2	33,33

Capaian sasaran 3



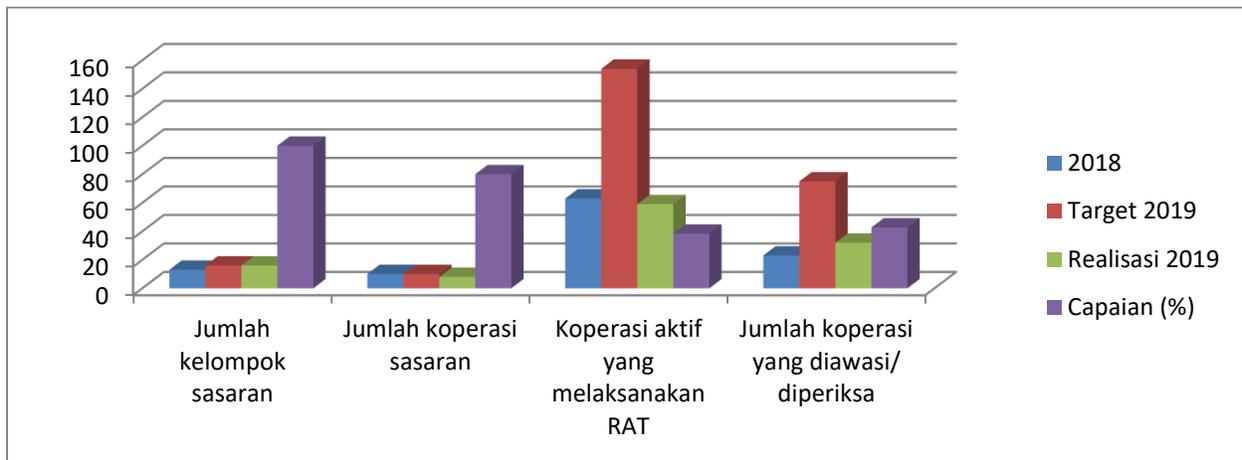
Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang didukung dalam kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, Rapat anggota tahunan koperasi/KUD dan Pembinaan pengawasan KSP dan KJKS.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2018	2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah kelompok sasaran	13	16	16	100
2	Jumlah koperasi sasaran	10	10	8	80
3	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	63	154	59	38,31
4	Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	23	75	32	42,66

Capaian sasaran 4



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai ke-empat sasaran tersebut di atas, antara lain :

1. Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu/ berkesinambungan kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tahun anggaran 2019 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sesuai dengan pagu anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 4.342.619.349., dengan realisasi sebesar Rp. 4.268.107.216., atau sebesar 98,94%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan salah satu kewajiban Perundang-undangan yaitu menyusun laporan kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/ kegagalan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan enam sasaran yang ingin diwujudkan/ dicapai sesuai dengan renstra tahun 2018 - 2022 yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;
5. Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar; dan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih menemui beberapa kendala antara lain :

1. Sumber daya manusia;
Aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.
2. Sarana dan pra sarana
Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/ kendala adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk (i) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, (ii) memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
4. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi,(iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Larantuka, Januari 2020

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,

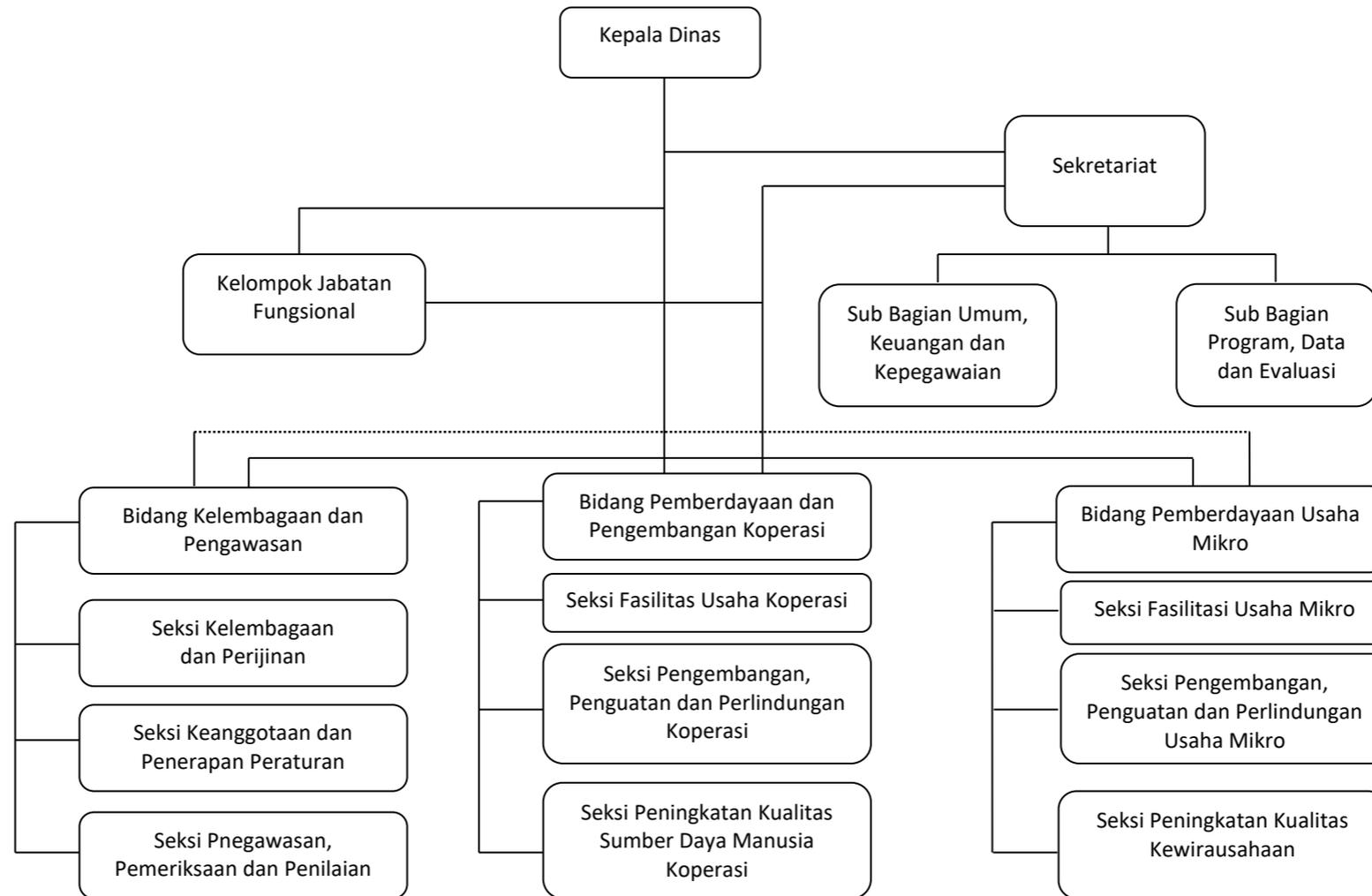


Achmad R. Duli, SE

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650516 199203 1 008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Catatan :
 Garis komando ———
 Garis koordinasi - - - - -

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA TAHUN 2020

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH BELANJA (RP)	JENIS BELANJA									%	SISA ANGGARAN	
				PEGAWAI			BARANG DAN JASA			MODAL					TOTAL
				Jumlah	REALISASI		Jumlah	REALISASI		Jumlah	REALISASI				REALISASI
					KEU (Rp)	FISIK (%)		KEU (Rp)	FISIK (%)		KEU (Rp)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BELANJA		3.590.187.767,00										3.474.056.547,00	96,77	116.131.220,00
1.15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3.590.187.767,00										3.474.056.547,00	96,77	116.131.220,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.927.528.944,00										1.856.379.108,00	96,31	71.149.836
	BELANJA LANGSUNG		1.662.658.823,00	552.531.900		-	1.110.126.923	-	-	-	-	-	1.617.677.439,00	97,29	44.981.384
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		784.864.139	465.150.000	462.000.000	99,32	319.714.139	316.790.580	-	-	-	-	778.790.580	99,23	6.073.559
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka	2.200.000			-	2.200.000	2.180.500	99,11	-	-	-	2.180.500	99,11	19.500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Larantuka	25.754.000			-	25.754.000	23.926.210	92,90	-	-	-	23.926.210	92,90	1.827.790
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan	Larantuka	2.993.000			-	2.993.000	2.488.220	83,13	-	-	-	2.488.220	83,13	504.780
	Dinas Operasional					-									
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Larantuka	54.600.000	54.600.000	52.600.000	96,34	-	-	-	-	-	-	52.600.000	96,34	2.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Larantuka	9.224.300	-	-	-	9.224.300	9.224.000	100,00	-	-	-	9.224.000	100,00	300
2	Penyediaan alat tulis kantor	Larantuka	29.220.700	-	-	-	29.220.700	29.220.700	100,00	-	-	-	29.220.700	100,00	-
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	42.867.200	-	-	-	42.867.200	42.866.950	100,00	-	-	-	42.866.950	100,00	250
2	Penyediaan komponen instalasi listrik / pemecahan bangunan kantor	Larantuka	21.508.439	-	-	-	21.508.439	21.508.000	100,00	-	-	-	21.508.000	100,00	439
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	2.000.000	-	-	-	2.000.000	1.500.000	75,00	-	-	-	1.500.000	75,00	500.000
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Larantuka	11.460.000	-	-	-	11.460.000	11.451.000	99,92	-	-	-	11.451.000	99,92	9.000
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kupang, Jkt	172.486.500	-	-	-	172.486.500	172.425.000	99,96	-	-	-	172.425.000	99,96	61.500
2	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka	410.550.000	410.550.000	409.400.000	99,72	-	-	-	-	-	-	409.400.000	99,72	1.150.000

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	11	2	11	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		43.626.470	-	-	-	43.626.470	43.598.259	99,94	-	-	-	43.598.259	99,94	28.211	
2	11	2	11	01	02	09	Pengadaan Peralatan-Gedung Kantor	Larantuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	2	11	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Larantuka	15.148.900	-	-	15.148.900	15.145.000	99,97	-	-	-	15.145.000	99,97	3.900	
2	11	2	11	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/ Operasional		25.507.570	-	-	25.507.570	25.498.259	99,96	-	-	-	25.498.259	99,96	9.311	
2	11	2	11	01	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Larantuka	2.970.000	-	-	2.970.000	2.955.000	99,49	-	-	-	2.955.000	99,49	15.000	
2	11	2	11	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		36.410.000	36.410.000	36.301.000	99,70	-	-	-	-	-	-	36.301.000	99,70	109.000	
2	11	2	11	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	36.410.000	36.410.000	36.301.000	99,70	-	-	-	-	-	36.301.000	99,70	109.000	
2	11	2	11	01	15	Program penciptaan iklim Usaha kecil menengah yang Kondusif		257.761.513	-	-	-	257.761.513	249.061.000	96,62	-	-	-	249.061.000	96,62	8.700.513	
2	11	2	11	01	15	08	Fasilitasi Pengembangan UKM	19 Kec.	217.880.513	-	-	217.880.513	209.210.000	96,02	-	-	-	209.210.000	96,02	8.670.513	
2	11	2	11	01	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19 Kec.	39.881.000	-	-	39.881.000	39.851.000	99,92	-	-	-	39.851.000	99,92	30.000	
2	11	2	11	01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		471.782.000	46.761.900	46.755.000	99,99	425.020.100	395.407.100	93,03	-	-	-	442.162.100	93,72	29.619.900	
2	11	2	11	01	16	07	Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Larantuka	417.358.000	46.761.900	46.755.000	99,99	370.596.100	342.737.100	92,48	-	-	389.492.100	93,32	27.865.900	
2	11	2	11	01	16	20	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Pemula Pasca pelatihan	19 Kec	43.155.000	-	-	43.155.000	43.080.000	99,83	-	-	-	43.080.000	99,83	75.000	
2	11	2	11	01	16	21	Identifikasi dan Pengembangan potensi Wirausaha Pemula / Wirausaha Baru		11.269.000	-	-	11.269.000	9.590.000	85,10	-	-	-	9.590.000	85,10	1.679.000	

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	11	2	11	01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		68.214.701	4.210.000	4.170.000	99,05	64.004.701	63.594.500	99,36	-	-	-	67.764.500	99,34	450.201
2	11	2	11	01	18	04	Sosialisasi prinsip - prinsip pondhman perkoperasian	8.125.201	-	-	-	8.125.201	8.120.000	99,94				8.120.000	99,94	5.201
2	11	2	11	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Kop. Berprestasi	11.944.500	4.210.000	4.170.000	99,05	7.734.500	7.569.500	97,87	-	-	-	11.739.500	98,28	205.000
2	11	2	11	01	18	12	Rapat Anggota Tahunan	35.635.000	-	-	-	35.635.000	35.600.000	99,90	-	-	-	35.600.000	99,90	35.000
2	11	2	11	01	18	29	Pembinaan Pengawasan KSP dan KJKS	12.510.000	-	-	-	12.510.000	12.305.000	98,36	-	-	-	12.305.000	98,36	205.000

